

ULAMA MENGGERAKKAN POLITIK AGRARIA



Abdul Mun'im DZ
Ketua LTN-NU dan
Redaktur Jurnal Tashwirul Afkar.
Ia juga berprofesi sebagai petani
di Sawangan

Pengantar

Berbicara masalah agrarian atau pertanian di Indonesia tidaklah mudah, sebab di satu sisi secara substansi sangat dibutuhkan, tetapi secara opini dan citra sangat dihindarkan. Sejak dilakukan modernisasi awal 1970-an di mana usaha pembangunan dimulai, melalui proses literasi, urbanisasi, dan industrialisasi, maka agraria secara bertahap terus dimarginalisasi. Proses literasi yang dikembangkan dalam sistem edukasi itu seluruhnya mengadopsi paradigma modernisasi, yang merupakan jiplakan

atas pengalaman dunia Barat yang kapitalis itu sangat mewarnai pandangan bangsa ini terhadap dunia Timur dan Indonesia khususnya.

Baik kalangan masyarakat terpelajar, kalangan pejabat, maupun pengusaha memiliki pandangan yang sama terhadap pertanian dan terutama mental pertanian. Karena modernisme ingin membangun manusia rasional, individualis, kompetitif, maka masyarakat petani yang rasional, komunal, dan harmonis dianggap tidak sesuai dengan agenda modernisasi. Karena itu, seluruh ahli ilmu sosial, yang kemudian diikuti oleh semua pejabat dan diamini pengusaha, memandang bahwa mentalitas agraris adalah rendah dan harus ditinggalkan.¹ Pandangan ini akhirnya mengena terhadap siapa pun yang pernah belajar di sekolah. Akibatnya, setiap siswa tercerabut dari akar kulturalnya.

Dalam pendidikan pesantren di masa lalu, jadwal pelajaran disesuaikan dengan musim pertanian, baik musim tanam atau musim panen, demikian juga disesuaikan dengan musim perikanan. Sebaliknya sistem sekolah modern yang sentralistik-eksklusif, memberlakukan sistem tunggal yang tidak mengapresiasi lokalitas, maka

¹ Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, CSIS, Jakarta 1981, hal, 43-45. Dalam buku ini teori modernisasi telah diterjemahkan secara detil dalam bentuk pembangunanisme yang teknokratis, represif..

murid tidak diberi kesempatan mengenal dunianya sendiri, bahkan didoktrin agar menjauhi pertanian karena hendak dimodernkan yang harus meninggalkan mental petani.

Istilah *agrarian* dan terutama agraris menjadi sangat *pejorative* (menghina). Memang istilah itu oleh para modernis, terutama para antropolog dan sosiolog, digunakan untuk menunjukkan derajat terendah dari tahap kemajuan berpikir masyarakat. Pandangan ini hampir memenuhi seluruh literatur ilmu sosial dan politik dan menjadi bahan pidato para pejabat dan politisi, sehingga sempurnalah penghinaan pada kelompok agraris. Dan secara bertahap kalangan muda meninggalkan sektor agraria. Maka saat itulah negara yang 80 persen penduduknya berbasis pertanian itu ditinggalkan warganya, karena kesesatan berpikir para ilmuwannya, dan kesalahan bertindak para pejabat dan politisinya. Akibatnya, Indonesia tertinggal tidak hanya dalam bidang pertanian, tetapi juga terbelakang dalam bidang industri. Karena ekonominya tidak memiliki basis, baik yang bersifat sosial maupun material. Ini bisa dimaklumi karena sebagian besar ilmuwan dan politisi kita saat itu adalah bekas para ambtenar, yang melihat hina kelompok pribumi yang bekerja sebagai petani. Sebaliknya bagi mereka kerja terbaik adalah sebagai priyayi di kantor, walaupun gaji kecil tetapi kebanggaan diperoleh.

Di tengah hinaan itu tetap muncul berbagai kreativitas, yang mampu menenggelamkan dunia, tetapi mereka itu kelompok

tersembunyi. Sementara lembaga-lembaga resmi, yang memiliki laboratorium hanya bisa membeli hak cipta berbagai temuan pertanian dari ilmuwan asing. Sedangkan para petani sendiri mampu mencipta sangat kreatif dan spektakuler, yang reputasinya dikagumi seluruh dunia. Kalangan pesantren yang selama ini hanya menekuni kitab, ternyata memiliki kreativitas yang sangat berarti. Tetapi tetap saja pemerintah dan kalangan perguruan tinggi tetap jumud, bebal tidak mampu mengapresiasi kreativitas bangsanya sendiri. Problem di sekitar keruwetan agraria ini patut untuk diurai secara rinci.

Agraria Sebagai Tumpuan

Pembangunan nasional kita memang secara formal mengarahkan pada pembangunan pertanian dan industri. Tetapi dalam perjalannya tidak jelas mana yang dijadikan *leading sector* (penggerak). Lama kelamaan pertanian tergusur oleh industri, ketika investor memilih investasi di bidang ini. Sementara hampir seluruh pemuda meninggalkan lahan pertanian dengan memasuki sektor industri, karena tidak semuanya tertampung di sektor modern ini. Tetapi, mereka enggan kembali ke pertanian, maka mereka terdampar di sektor informal di perkotaan, sebagian lagi menjadi pengangguran, sementara banyak lahan pertanian terlantar kekurangan tenaga kerja dan tidak dikelola secara intensif.

Sebenarnya, sejak awal kemerdekaan, sektor pertanian telah mulai ditata, mengingat bercocok tanam merupakan pekerjaan yang paling banyak digeluti

negeri yang baru merdeka itu. Memang kebutuhan utama saat itu adalah kecukupan di bidang pangan dan sandang. Dari sektor itulah ekonomi nasional diperhebat, dengan adanya prinsip mandiri secara ekonomi, semua dicoba untuk dicukupi sendiri, karena itu pemerintah mulai menasionalisasi lahan pertanian dan pertanian subur yang masih dikuasai Belanda dan Eropa lainnya. Seluruh agenda ini dirumuskan dalam Pembangunan Semesta Berencana 1961-1968. Untuk mengawali program ini tidak mudah. *Pertama*, belum banyak yang ahli di bidang pertanian, selain itu juga ada upaya untuk mempertahankan budaya pangan di masing-masing daerah agar satu daerah bisa mencukupi kebutuhan pangannya sendiri.

Apalagi saat itu kalangan elit masih terbiasa dengan makanan yang serba Eropa, maka pemerintah memperkenalkan makanan tradisional. Program ini dipromosikan oleh Presiden Soekarno sendiri, bahkan dicontohkan sendiri, gerakan makan nasi jagung dan palawija lainnya. Semua hasil usaha pertanian mulai dari padi, jagung, palawija, sagu, dan pisang menjadi makanan pokok masyarakat. Kecukupan pangan berdasarkan selera dan ketersediaan daerah itu membuat ketahanan pangan sangat kuat. Bahkan Indonesia sangat aktif menyumbangkan pangan ke negara lain, baik di Asia maupun Afrika.

Karena pemerintah pusat memiliki kedaulatan dalam menentukan politik pertanian dan kebijakan pangan, maka variasi makanan tetap dipertahankan dan

dikembangkan. Bersamaan dengan ini berbagai program perbaikan gizi diperkenalkan, termasuk pengobatan modern, tetapi tetap ditegaskan bahwa ini bersifat sementara. Pangan nasional dan *eastern medicine* (pengobatan timur) terus dikembangkan sebagai alternatif atas dominasi *western medicine* (pengobatan barat) yang dikembangkan atas prinsip kapitalis, sehingga sangat memberatkan masyarakat, baik secara ekonomis maupun medis, karena belum tentu sesuai dengan keuangan dan fisik masyarakat Nusantara. Kebijakan politik pangan dan pengobatan ini tertumpu pada hasil pertanian terutama perkebunan. Budidaya tanaman obat menjadi program penting yang didukung dengan berbagai penelitian ilmiah.

Ketika sektor pertanian dijadikan sebagai dasar ekonomi nasional, maka seluruh program nasional termasuk teknologi, industri, dan keuangan termasuk juga pendidikan dikonsentrasikan di bidang pertanian. Sejak tahun 1950-an dibangun industri pesawat terbang yang semula guna melengkapi sarana pertahanan, kemudian direorientasi sebagai sarana pertanian, digunakan untuk pengendalian hama dan pengangkutan hasil tani. Pembangunan bendungan raksasa serba guna seperti Jatiluhur dan Karangates 1960-an juga diarahkan pada pertanian dan tenaga listrik untuk membangun pabrik alat dan sarana pertanian. Selain itu pada tahun 1960-an dibangun proyek mulia, yaitu pembangunan reaktor nuklir antara lain reaktor Bandung berkapasitas 1 MW, reaktor Yogyakarta berkapasitas 300 KW,

dan reaktor nuklir Sepong berkapasitas 30 MW. Reaktor itu juga diarahkan untuk riset dan pengembangan benih yang merupakan sendi pertanian. Tak satu pun orang menentang proyek ini karena saat itu belum ada infiltrasi asing melalui akademisi maupun politisi untuk menggagalkan proyek ini. Ini sebagai proses *nation building* membangun sebuah negara besar, yang berdikari secara politik dan ekonomi. Semuanya ini terumuskan secara komprehensif dalam Pembangunan Semesta.²

Pemerataan Lahan melalui *Land Reform*

Menjadikan pertanian sebagai *leading sector* kebangkitan sebuah bangsa sebagaimana dilakukan oleh pemerintah pada awal kemerdekaan tidaklah bisa dilaksanakan saat pemilikan tanah masih sangat timpang. Lahan subur, selain dikuasai oleh perusahaan Belanda, juga berada di tangan para tuan tanah. Untuk mengatasi ketimpangan ini, diusahakanlah untuk melakukan redistribusi tanah. Seluruh kekuatan nasional mengarah pada agenda untuk mewujudkan keadilan sosial. Program ini dimulai sejak tahun 1948 di Yogyakarta saat gencarnya pertempuran melawan Belanda yang menyerbu kem-

bali Indonesia bersama sekutu.

Usaha ini belum berjalan dengan baik, tetapi sebuah permulaan yang menentukan, walaupun gagasan ini membuat Belanda semakin keras menggempur Indonesia, ketika melihat asetnya hendak dinasionalisasi. Ketika suasana sedikit mereda, gagasan itu dimulai lagi pada tahun 1951. Program ini terhambat ketika memasuki 1955. Persoalan politik kembali mengemuka, di mana persoalan sosial dan ekonomi tidak menjadi perhatian utama sistem demokrasi liberal. Saat itu, setiap kelompok lebih memperjuangkan kepentingan kelompoknya berdasarkan hak ketimbang menjalankan kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baru setelah presiden mengeluarkan dekret pada tahun 1959 itu, politik Indonesia bisa dikonsentrasikan pada pembangunan nasional, maka pada tahun 1960 Program redistribusi tanah melalui program *land reform* dilanjutkan kembali dengan penuh kesungguhan.³ Program ini didukung oleh semua partai politik yang ada, karena ini merupakan salah satu kunci mewujudkan masyarakat adil makmur. Untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan sebagai negara besar, maka kesejahteraan sosial

² Baca, *Peringatan 20 Tahun Indonesia Merdeka*, Departemen Penerangan RI, 1965, buku ini terdiri delapan jilid yang masing-masing buku terdiri dari 600 halaman lebih, yang melaporkan secara detil hasil pembangunan selama Indonesia merdeka.

³ Ahmad Ya'kub, *Konflik Agraria, Tinjauan Umum Kasus Agraria di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit FSPI, 2007), h. 72.

perlu dibangun. Pemilikan tanah merupakan eksistensi kehidupan manusia, melalui program distribusi tanah ini bangsa ini akan dijadikan bangsa yang memiliki eksistensi, atau memiliki karakter, sehingga bisa menjadi bangsa yang berkarakter. Jadi persoalan pembagian tanah ini berkaitan erat dengan *character building* dan *nation building*, sehingga didukung semua pihak yang memiliki prinsip kebangsaan.

Demikian juga kalangan ulama juga sangat mendukung program mulia ini, karena dalam kenyataannya banyak lahan subur yang diterlantarkan, karena pemilikan lahan yang terlalu luas, sehingga pemiliknya tidak mampu mengelola. Demikian juga tanah persil milik Belanda tidak semuanya tergarap, padahal rakyat sangat punya tenaga dan membutuhkan lahan. Sementara bagi umat Islam, *ihyau ardilil mawat* (mengelola tanah terlantar) merupakan langkah yang sangat mulia. Karena itu, menurut pandangan agama mereka berhak memiliki tanah tersebut (*man ahyu ardilal maitata fahiya lahu*). Ini sesuai dengan prinsip hanya dengan tanah yang hidup, suatu negara bisa hidup, rakyat bisa hidup, sebuah bangsa bisa hidup. Sehingga bagi pengelola tanah mati mempunyai kedudukan tinggi, karena menghidupkan seluruh makhluk yang ada di atasnya.

Karena landas *siyasi* (politik) dan landasan *syar'i* (agama) ketemu dalam

program ini, maka pada tahun 1960 itu UU Pokok Agraria disahkan oleh DPRGR yang ketuanya saat itu adalah KH Zainul Arifin dari Partai Nahdlatul Ulama (PNU). Tentu saja undang-undang ini masih perlu dibuat peraturan pemerintah serta berbagai petunjuk pelaksanaan sampai petunjuk teknisnya. Tetapi ketika masih dalam proses itu, kalangan Partai Komunis Indonesia (PKI) menggunakan undang-undang itu terutama bagian *land reform* sebagai sarana untuk tema kampanye partainya.

Program ini menjadi kisruh, karena semestinya pelaksanaannya adalah pemerintah, dalam hal ini Menteri Agraria atas persetujuan partai politik yang ada. Tetapi pihak komunis melangkahi seluruh prosedur itu, melangkah sendiri dengan cara merampas tanah rakyat, untuk diberikan kepada para pengikut atau simpatisannya. Inilah yang kemudian disebut dengan aksi sepihak, karena seharusnya merupakan aksi bersama dan aksi berbagai pihak. Akhirnya, *land reform* itu lebih menjadi perebutan tanah ketimbang pembagian tanah, yang akhirnya terjadi konflik sosial. Nahdlatul Ulama (NU) dalam hal ini Persatuan Tani Nahdlatul Ulama (Pertanu) menyetujui agenda *land reform*, tetapi menolak langkah BTI-PKI, yang menjalankan sendiri *land reform* tanpa diatur oleh mekanisme yang jelas dan disepakati

⁴ Soekedy, (ed), *Biografi Imam Churmen; Penyambung Lidah Petani*, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004), h. 91.



tp3blogger.com

bersama dan perencanaan yang matang.⁴

Dengan pembagian tanah seperti itu, kalangan pemilik tanah, bukan tuan tanah belum siap untuk membagi, demikian juga kalangan masyarakat tuna tanah juga tidak memiliki kesiapan baik tenaga maupun modal untuk menerima pembagian. Di samping itu, mereka merasa tidak enak mendapatkan tanah hasil rampasan, atau sedikitnya pembagian paksa, sehingga menjadikan keretakan sosial antarsesama tetangga. Karena itu sebagian hanya dilaksanakan dalam bentuk akal-akalan. Bagi yang menerima secara benar, kebanyakan di antara mereka juga menjual kembali, karena tidak memiliki cukup tenaga dan modal untuk mengelola tanah yang lebih luas. Apalagi sebenarnya di kampung tidak banyak tuan tanah dalam arti sebenarnya. Bahkan antara pemilik tanah dengan buruh tani terjadi hubungan yang lebih personal, mereka tidak eksploitatif tapi bersifat saling menunjang. Dalam masa pakeklik, pemilik tanah menanggung

kehidupan para buruh, dan buruh mendapatkan upah layak dari pemilik tanah, bahkan berbagai tunjangan dan bantuan baik melalui zakat maupun sedekah diberikan, sehingga tidak terjadi kontradiksi antara pemilik tanah dengan buruh tani.

Kekeliruan analisa Marxis yang digunakan PKI untuk menganeksasi

masyarakat Indonesia ternyata gagal, karena tidak memahami sosiologi rakyat Indonesia. Petani bukan musuh pemilik tanah, sebaliknya merupakan mitra kerja yang saling membantu. Oleh karena itu, ketika terjadi aksi sepihak, para petani tidak memihak pada PKI yang membagi tanah, sebaliknya memihak kepada pemilik tanah, karena kebanyakan para buruh tani adalah mitra pemilik tanah. Mereka merasa tidak pas dengan langkah PKI yang memicu ketegangan sosial, sementara mereka lebih membutuhkan harmoni.

Langkah PKI yang membabi buta dan tanpa aturan itu membuat gagasan ideal *land reform* gagal dilaksanakan, bahkan gagasan itu menjadi buruk dan dikesankan hanya gagasan PKI, sehingga identik dengan PKI. Karena itu, pikiran itu dijauhkan sejalan dengan diharamkannya PKI di negeri ini. Selama kekuasaan Orde Baru, isu itu menjadi tabu, sebaliknya monopoli lahan berjalan sangat luar biasa. Hal ini tidak dilakukan oleh petani, tetapi

oleh para industrialis, atau konglomerat yang menanam tanaman industri, baik tebu, sawit dan kayu. Bagi petani yang berusaha mempertahankan lahan mereka dianggap tidak mendukung pembangunan, ini berarti anggota PKI.

Rakyat Indonesia memang kurang beruntung. Kalau dulu *land reform* disabot PKI, zaman Orde Baru *land reform* dibekukan, sementara pasca reformasi landreform disabot oleh kapitalis Bank Dunia. Komandan kapitalis itu mengembangkan landreform baru yang disebut dengan *marked led land reform* (reforma tanah yang dipimpin pasar). Dengan dana yang besar, sejak 1995 agenda itu dengan mudah menjadi program pemerintah yang dijalankan oleh PBN. Program ini diterima antusias oleh kalangan LSM, partai politik bahkan Ormas. Padahal Bank Dunia sengaja mendorong *land reform* ini hanya untuk sertifikasi dan privatisasi tanah komunal agar mudah dijarah secara legal oleh kapitalis global. Terbukti *land reform* yang dilakukan kapitalisme yang bernaung di bawah PBB seperti di Brazilia dan Afrika Selatan malah mempercepat konsentrasi pemilikan tanah ke tangan pengusaha besar.⁵ Rakyat semakin menderita dan tuna kisma. *Land reform* serta administrasi tanah yang berbahaya bagi rakyat dan negara ini sedang jalan

dengan dukungan banyak pihak. Apalagi dalam UU investasi dan pertanahan yang baru telah menyamakan hak rakyat Indonesia dengan bangsa asing.

Petani di Tengah Monopoli

Program pemerintahan Soekarno dengan Demokrasi Terpimpinnya yang populis dan nasionalistis ini berpotensi menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dari segi ekonomi dan politik. Langkah ini sangat meresahkan negara kapitalis-imperialis seperti Amerika Serikat dan Eropa. Berbagai sabotase ekonomi dan politik dilakukan bersama dengan bekas pemberontak DI-TII, PRRI-Permesta, sehingga mengacaukan ekonomi nasional. Bagi penjajah, tidak ada cara lain selain melakukan *feet to fire* (membendung langkah) pemerintah Indonesia.⁶ Dipakailah Soeharto dan didukung mahasiswa angkatan 1966, yang dengan naifnya memakzulkan pemerintahan merdeka, menjadikan Indonesia sebagai negara komprador kapitalis yang memeras aset negara dan tenaga rakyat.

Sejak awal Orde Baru melalui Repe-lita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) juga memperhatikan bidang pertanian. Tetapi ini bukan agenda yang mandiri diatur oleh rakyat dan negara, melainkan dikendalikan oleh lembaga internasional

⁵ Indra Lubis (ed), *Membongkar Kepalsuan Landreform Bank Dunia*, (Jakarta: Petani Press, 2003), h. 86 dan 128.

⁶ Kenneth Conboy, *Feet to The Fire, CIA Covert Operation in Indonesia, 1957-1958*, (Maryland: Naval Institute Press, 1999), h. 37-38.

seperti FAO (*Food and Agriculture Organization*) dan organisasi PBB lainnya. Tujuannya bukan untuk mengembangkan ekonomi nasional atau untuk memandirikan rakyat, tetapi sebagai pasar untuk mengatasi kelebihan stok beras di pasar dunia. Maka yang dilakukan 'berasiasi' dengan unifikasi selera, karena hanya memperkenalkan tanaman padi dan makanan beras, sementara varian makanan lain seperti buah dan palawija dipinggirkan karena dianggap tidak memenuhi standar gizi, bahkan dianggap makanan primitif. Ketergantungan pada beras menjadi tinggi, sementara itu pengembangan industri tidak diarahkan ke pertanian. Sehingga sektor pertanian tertinggal, dan ini mengakibatkan hasil pertanian merosot. Ketika produk nasional tak mencukupi, akhirnya mengambil jalan pintas impor, yang hanya menguntungkan pengusaha dan menghancurkan petani. Seperti rencana semula, stok beras dunia terserap oleh pasar Indonesia.

Dana hutang besar-besaran yang diperoleh dari Bank Dunia juga tidak boleh digunakan untuk pengembangan sektor pertanian yang padat karya, karena sektor ini tidak menguntungkan bagi negara donor. Sebagaimana dikatakan Bell, penasehat pemerintah RI dari Amerika Serikat, bahwa penggunaan dana negara untuk sektor agrobisnis yang

padat karya itu penuh resiko, karena itu perlu dihindari. Pandangan ini diterima oleh para menteri, sehingga dana dari Bank Dunia itu banyak diarahkan untuk industri, yang nota bene tidak dipegang oleh rakyat pribumi.⁷

Saat ini, memang terjadi kebijaksanaan yang sangat diskriminatif, di mana kalangan pribumi sulit memperoleh kredit dari perbankan maupun akses ke sektor perekonomian. Pemerintah lebih mengutamakan pengusaha non pribumi, terutama Cina. Sebagaimana dikatakan oleh Ali Wardhana, ketika kebijakannya yang diskriminatif itu dikritik oleh Hasyim Ning bahwa kalau rakyat pribumi diberi perlindungan mereka tidak akan pernah menjadi dewasa.⁸ Tetapi anehnya perlindungan diberikan pada pengusaha Cina yang sudah kuat dan diberi akses modal luar biasa besar. Sementara kelompok pribumi dipinggirkan, akhirnya hanya pengusaha Cina yang berkembang.

Ini sejalan dengan gerak politik Orde Baru yang didukung angkatan 1966 itu sebagai negara komprador atau boneka. Kebijakan yang diskriminatif ini sebagai bagian dari upaya memperlemah posisi politik nasional. Setelah PKI dibubarkan, PNI dikebiri, maka tinggal NU yang tersisa, maka kelompok inilah yang menjadi ganjalan terakhir rezim ini. Maka dilakukanlah upaya untuk menekan secara

⁷ AA. Nafis, *Biografi Hasyim Ning : Pasang Sunut Pengusaha Pejuang*, (Jakarta: Graffiti Press, 1986), h. 374.

⁸ AA. Nafis, *Biografi Hasyim Ning*, h.373.

politik kekuatan ini dan juga dilakukan tekanan secara ekonomi. Kekuatan industri NU yang berada di berbagai tempat seperti Pekalongan, Tegal, Gresik, Garut, Tasikmalaya dan Sidoarjo, mulai disaingi dengan industri baru. Fasilitas dan modal tidak diberikan pada usahawan NU yang telah mapan di daerah itu, karena NU merupakan partai yang mandiri, dan kemudian menjadi unsur dominan dalam PPP. Karena itu harus diperlemah secara ekonomi, maka teknologi dan modal diberikan pada pengusaha non pribumi, sehingga pelah-pelan usaha warga nahdliyin itu surut. Tidak sedikit yang gulung tikar, sehingga kemandirian ekonomi para ulama merosot.

Surutnya industri di kalangan kaum santri ini membuat banyak di antara mereka yang kembali ke sektor pertanian. Walaupun usaha ini tidak terlalu menguntungkan, tetapi masih bisa untuk bertahan. Apalagi bidang pertanian ini sangat dikuasai sehingga bisa menjadi andalan ekonomi kaum santri. Dengan sarana itu, mereka bisa mendirikan lembaga pendidikan, masjid, dan pesantren. Tetapi lama kelamaan sektor ini semakin tidak menguntungkan, harga beras dan gula serta sayuran terus ditekan, sehingga petani mengurangi produksinya untuk memperkecil kerugian. Sambil mencari berbagai kemungkinan diversifikasi usaha di sektor agrobisnis.

Merosotnya sektor pertanian ini sangat memukul para petani dan terutama petani gurem serta buruh tani. Kalau selama ini dengan pertanian mereka bisa membiayai kehidupannya, maka sekarang

bertani tidak bisa untuk hidup. Apalagi setelah negeri dikuasai tengkulak, maka agrobisnis mengalami kemandekan. Terlebih ketika para tengkulak membanjiri negeri ini dengan barang impor yang membunuh petani sendiri. Celakanya pemerintah mendukung para cukong ini. Akibatnya para petani banyak yang menjadi pengangguran di desa serta banyak anak putus sekolah karena tidak ada biaya sekolah, ketika sekolah semakin mahal. Di sisi lain mereka harus membantu orang tua mencari nafkah.

Petaka Politik Benih

Dalam bidang agraria, benih menempati posisi yang sangat penting, karena tidak hanya menentukan hasil, tetapi juga menentukan keberlangsungan sistem pertanian yang dikembangkan. Mengingat kenyataan ini, berbagai pencarian, percobaan, bahkan riset yang lebih serius dilakukan, baik oleh kalangan petani, ulama, dan ilmuwan sendiri. Berbagai temuan diperoleh dalam proses ini, yang kesemuanya berbasis pada keanekaragaman bibit lokal, baru sisanya diperoleh dari tempat lain, hasil tukar menukar keilmuan antar bangsa yang merdeka.

Berbeda dengan zaman sebelumnya yang berprinsip berdikari secara ekonomi, pembangunan sektor pertanian di awal Orde Baru yang bertumpu pada teknik dan kebijakan yang dikendalikan oleh FAO dan IRI merupakan politik benih yang dikendalikan oleh kapitalisme global, dengan univikasi varitas padi yang melenyapkan seluruh benih lokal yang sesuai dengan alam sekitar, yang tidak

mebutuhkan pupuk dan pestisida buatan. Kebijakan yang dilansir melalui Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD) itu dilaksanakan dengan kekerasan, dilakukan penangkapan terhadap siapa saja yang tidak menanam benih padi impor, dan membabat dengan paksa yang masih menanam padi lokal, karena dianggap sebagai sarang hama. Pada pertengahan tahun 1970, langkah ceroboh yang berbasis monokultur itu akhirnya menghasilkan hama wereng yang memukul telak produksi beras nasional.

Dengan dilenyapkannya benih lokal, maka intensifikasi padi sangat tergantung pada bibit impor. Dengan padi impor yang membutuhkan perawatan mahal, maka keuntungan pertanian menjadi kecil, apalagi secara berkala harga pupuk dan pestisida terus dinaikkan sementara harga pertanian ditekan. Hanya kalangan tradisi yang ada di pedalaman yang masih mempertahankan bibit lama yang hanya panen setahun sekali, anehnya mereka tidak pernah kekurangan pangan.

Di tengah himpitan penyeragaman pangan melalui penyeragaman benih itu, berbagai upaya petani dilakukan untuk menciptakan budi daya pertanian yang terjangkau. Tahun 1960-an, Mukibat—seorang santri dari Kediri—yang menciptakan temuan baru dengan singkong akulasi yang mampu mendongkrak produksi singkong antara 15-20 kg per batang, temuannya itu diabadikan dengan sebutan Singkong Mukibat. Temuan itu dilanjutkan lebih spektakuler oleh seorang ulama dari Lampung, KH Abdul

Jamil, pemimpin pesantren Darul Hidayah. Temuannya ini bukan okulasi, melainkan silangan, sehingga di samping memiliki produktivitas tinggi, bibit bisa dikembangkan secara massal sebagai pemasok bibit singkong nasional. Bibit yang diberi nama *darul hidayah* sesuai dengan naman pesantrennya itu saat ini dikembangkan untuk memenuhi stok bibit nasional yang permintaannya terus meningkat sejalan dengan dikembangkannya bahan bakar nabati (BBN) yang berbahan dasar singkong.

Di Lamongan, KH Mubarak mengembangkan berbagai jenis agrobisnis, mulai dari tanaman konsumsi hingga tanaman obat, yang bisa memasok kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau. Semuanya itu dikembangkan bukan oleh lembaga pemerintah yang memiliki laboratorium dan dana penelitian, melainkan dikembangkan petani dengan usaha tanpa fasilitas dan pengetahuan memadai.

Bahkan Greg Hambali, seorang pemulia pertanian di Bogor berusaha mengajak LIPI untuk melakukan riset pengembangan hortikultura, tetapi ditolak oleh lembaga negara itu, ketika dianggap tidak relevan. Akhirnya, ia melakukan riset individual sehingga mampu membuat silangan baru sebuah tanaman *aglaonema* dari warna hijau menjadi *aglaonema* merah. Ini sebuah revolusi agrobisnis yang menggemparkan dunia hortikultura, temuannya itu diberi nama *pride of sumatera*. Tidak ayal, penemuannya itu membuat malu para ahli pertanian Thailand, apalagi setelah itu berbagai varitas *aglaonema* baru yang

lebih pernik diciptakan oleh petani Bogor itu, yang perbatang bisa berharga ratusan juta. Saat ini, di Thailand muncul puluhan ahli penyilangan, tetapi belum mampu mengalahkan penyilang Indonesia. Sayangnya, di Indonesia hanya ada satu penyilang, sementara di Thailand lahir puluhan penyilang, karena pemerintah dan masyarakat mendukungnya. Ketika Hayuningdaun Nursery mengajak Puspitek untuk mengembangkan tanaman ini secara massal dengan kultur jaringan, tawaran itu ditolak dengan dalih tidak ada dana. Ketika disediakan dana, mereka pun enggan melakukan eksperimen. Akhirnya, produk Indonesia itu dibiakkan Thailand, sehingga produksinya membanjiri pasar hortikultura Indonesia.

Di bidang peternakan juga terjadi perkembangan yang membanggakan. Ketika bibit perkutut dikuasai peternak negeri gajah itu, seorang peternak Surabaya asal Madura mampu mengembangkan gen perkutut baru yang menjadi *basic blood* yang menelurkan perkutut dengan suara yang tidak hanya panjang dan nyaring, tetapi memiliki irama yang merdu. Padahal sistem yang dikembangkan sangat bertentangan dengan teori ilmiah ketika menerapkan sistem silangan *inbreed*, yang selama ini dianggap akan mengakibatkan degenerasi. Dengan selingan *extra breeding* justeru menemukan gen baru yang memiliki karakter lebih kuat dan stabil. Produk Haji Muhammad ini kemudian banyak dikembangkan di Bangkok Thailand.

Saat ini, ketika masyarakat desa kebanjiran benih jagung hybrid dengan

harga mahal, maka mereka mengakalnya dengan mengembangkan F2 nya. Mereka bisa memperoleh bibit dengan mudah dan murah dari ladang sendiri. Tetapi perusahaan multi nasional yang bermain di berbagai daerah tidak mau menerima kreativitas petani, karena itu mereka diperkarakan, dengan dalih melanggar hak cipta. Sebuah tradisi kapitalis yang diperkenalkan pada rakyat Indonesia. Saat ini, Indonesia membutuhkan satu juta benih sapi unggulan, tetapi karena tidak ada usaha dari pemerintah maka masyarakat hanya mampu memproduksi 400 ribu, kalau tidak dipenuhi sendiri akan didahului oleh importer, ini akan merugikan rakyat dan negara.

Seperti Kompeni dulu, mereka itu bekerja sama dengan aparat lokal. Aparat bayaran itulah yang menangkap dan memenjarakan petani yang berani menanam jagung dengan bibit sendiri. Ini sebuah ironi bagaimana pemerintah daerah dengan aparatnya yang kejam menangkap rakyatnya sendiri yang berusaha hidup mandiri menghindari hisapan kapitalis. Ini karena pemilihan kepala daerah langsung itu banyak yang dibiayai oleh korporasi besar, sehingga mereka lebih setia pada korporasi ketimbang pada rakyat.

Kreativitas rakyat dalam menciptakan benih terus berkembang. Berbagai organisasi petani yang berbasis petani juga bermunculan, seperti misalnya Serikat Petani Indonesia (SPI). Organisasi petani yang didukung oleh banyak kalangan ulama pesantren ini membuat beraneka ragam bibit unggul. Bibit tersebut belum

dijual bebas, tetapi terus ditukar antar petani di berbagai daerah, sehingga bisa menyebar dengan selamat ke tangan petani, di luar kontrol kapitalis-kolonialis. Strategi ini dilakukan agar hasil mereka tidak dipatenkan oleh para kapitalis. Kalau sudah demikian mereka bisa mengkriminalisasi para petani pencipta benih tersebut. Karena itu, mereka mengedarkan benih unggul antarjaringan petani, sebuah strategi rakyat menghadapi pemerintahan kapitalis yang hanya mengabdikan kepada kapitalis global, dengan memusuhi rakyat dan menghambat kreativitasnya.

Manipulasi Politik Irigasi

Selain masalah tanah dan benih, maka air merupakan bidang yang sangat strategis dalam bidang agraria. Dengan adanya air itulah tanah menjadi subur dan benih yang ditanam akan tumbuh. Apalagi daerah tropis yang tinggi curah hujan itu memungkinkan pembukaan lahan basah. Ketersediaan air lahan ini perlu dijaga agar produksi terus meningkat. Zaman Airlangga terkenal dengan irigasi bawah tanah. Demikian pula zaman Majapahit, bahkan diteruskan oleh para ulama, seperti dilakukan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari di Martapura abad ke-18 dengan membuat sungai sepanjang 10 kilo meter sebagai sarana irigasi transportasi dan drainasi. Sehingga daerah yang dulunya terlantar menjadi hidup secara sosial dan ekonomi. Karena itu, sejak awal pemerintah membangun berbagai bendungan raksasa yang dilengkapi dengan saluran irigasi teknis, sehing-

ga sawah tidak hanya mengandalkan hujan, tetapi irigasi bisa memfasilitasi.

Dalam Repelita Orde Baru juga membangun berbagai bendungan dan jaringan irigasi, melainkan bukan untuk kemandirian petani dan kemandirian nasional, tetapi semata menjalankan program FAO dan Bank Dunia yang perlu menyalurkan dananya. Aparat kapitalisme global itu bekerja dengan kedok kemanusiaan, tetapi terus menjerat leher petani, karena penggusuran dan penindasan menyertai program ini. Bahkan penanggulangan kemiskinan dan korupsi dilakukan mereka, tetapi kesemuanya itu sebagai selubung atas kerakusan mereka sendiri. Pembangunan pabrik pupuk dan petrokimia yang menggunakan dana rakyat, tetapi bukan untuk menunjang pertanian, melainkan sebagai bisnis murni, karena itu harganya terus dilipatgandakan sehingga melampaui hasil usaha tani sendiri. Petani tidak dijadikan subjek, tetapi sekadar obyek untuk dieksploitasi dengan berbagai jargon yang manipulatif.

Tidak sedikit lembaga dana swasta yang beroperasi untuk membangun sarana irigasi bagi petani. Tetapi ternyata seluruh usaha ini adalah sebuah langkah untuk memperlancar proses privatisasi sumberdaya air. Funding atau lembaga dana itu malah memfasilitasi berbagai korporasi besar dalam menggelindingkan pengesahan undang-undang privatisasi air termasuk air minum dan irigasi. Undang-undang ini sebenarnya tidak dikehendaki baik pemerintah, DPR, apalagi rakyat, tetapi ini merupakan bagian dari paket paksaan IMF, yang membarter uang

pinjaman dengan undang-undang. Padahal undang-undang ini sangat merugikan negara, dan menyengsarakan rakyat hanya menguntungkan para kapitalis, sehingga bisa menguasai seluruh sumber dan mata air di negeri ini.

Itulah sebabnya kalangan ulama di Nahdlatul Ulama, tidak bisa bertopang dagu secara resmi mengeluarkan taushiyah agar parlemen menunda pengesahan rencana undang-undang Sumber Daya Air pesanan IMF itu, karena tidak sesuai dengan semangat pasal 33 UUD 45. Bila hal itu dilaksanakan akan menyengsarakan rakyat, ketika harus membeli air baik untuk minum maupun irigasi.⁹ Undang-undang itu akhirnya disahkan dengan tidak fair dan tanpa memperdulikan keberatan para ulama dan rakyat, maka saat ini semua sumber air termasuk sumber Bengawan Solo dan Tulungrejo, sumber Sungai Brantas menuju proses swastanisasi, sehingga orang harus membeli saat mengakses sungai besar itu. Ini akan menghambat usaha tani, yang merupakan pertahanan terakhir ekonomi rakyat. Ini kian menyengsarakan rakyat ketika industri-industri rakyat seperti rokok kretek, roti, dan minum-

an sudah lama digilas oleh kapitalis besar.

Prospek Agraria Indonesia

Usaha di bidang agraria atau *agriculture* bagi rakyat Indonesia memang masih menghadapi kesulitan, ketika basis utama sektor itu yakni tanah, benih, dan air dikonsentrasi dan dimonopoli oleh perusahaan besar yang berskala multi nasional yang beroperasi hingga ke ujung desa. Kenyataan ini menjadikan usaha tani menjadi sangat mahal, sehingga tidak menguntungkan. Tanah, air, dan benih menjadi mahal, belum lagi pupuk serta obat tanaman. Apalagi semua sarana produksi tani itu tidak dikuasai petani sendiri, tetapi oleh bisnis besar, sehingga harganya tidak terjangkau.

Pertanian Indonesia ke depan hanya mungkin dijalankan ketika negara ini



saryono.files.wordpress.com.

⁹ Lihat *Pernyataan Sikap PBNU Tentang RUU Sumber Daya Air*, yang dikeluarkan pada 19 Februari 2004

memiliki kedaulatan, sudah bebas merdeka dari tekanan negara lain dan perusahaan asing yang hanya mengeksploitasi rakyat Indonesia. Gerakan privatisasi yang telah mengarah para piratisasi (penjarahan) itu harus dihentikan agar negara tidak lumpuh. Untuk melakukan hal ini, perlu adanya kesadaran di kalangan rakyat Indonesia bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah bentuk penjajahan, baik secara politik, ekonomi, budaya dan pengetahuan. Karena itu, melakukan revolusi ilmiah untuk mengubah pandangan akademik tentang agraria, tentang kebangsaan, dan tentang tradisi menjadi sangat mendesak dilaksanakan.

Dengan adanya revolusi pemikiran dan kesadaran itu, maka akan timbul kesadaran politik secara massif. Sehingga upaya untuk mengantisipasi bangsa ini dari segala bentuk penjajahan yang beroperasi melalui lembaga-lembaga kemanusiaan internasional itu bisa ditanggulangi. Dengan demikian, bangsa ini bisa merumuskan agendanya sendiri, tidak hanya bidang agraria, tetapi juga dalam bidang industri dan penataan kembali sistem ketatanegaraan.

Perombakan sistem politik kenegaraan merupakan langkah penting dalam agenda ini. Pembangunan ekonomi pertanian bisa menjadi titik semua langkah ini, sebab kekuatan kita ada di sana. Bila rakyat kuat secara politik dan ekonomi bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, yang mampu menjaga kesejahteraan dan ketenteraman dunia internasional.

Peringatan 100 tahun kebangkitan nasional ini merupakan momentum penting untuk membangkitkan kembali bangsa ini, dan bangkit dari kegelapan alam penjajahan dan mengepalkan tangan menuju alam kemerdekaan. Kalau dulu membedakan antara penjajahan dengan kemanusiaan demikian mudah, tetapi saat ini hampir seluruh penjajahan itu berkedok kemanusiaan atau dalam bentuk politik etis. Hanya masyarakat yang memiliki kepekaan dan daya kritis serta terbebas dari egoisme yang mampu melihat tipu muslihat politik etis semacam itu. Ini artinya pembangunan agraria Indonesia membutuhkan pengabdian tulus-ikhlas dan perjuangan yang tak kenal menyerah.

Dalam langkah ini, peran para tokoh adat, para ulama dan petani sendiri perlu dikedepankan, sebab hingga saat ini terbukti mereka bisa bekerja mandiri, mereka memiliki pengetahuan tentang tanaman, baik yang tersimpan dalam serat, primbon dan pengalaman dari nenek moyang. Dengan itu, mereka memiliki pengetahuan tentang pengolahan tanah, pengaturan air, serta pengembangan benih. Para kiai di Nusa Tenggara Baratlah yang pertama kali menemukan sistem budi daya gaharu. Demikian juga dari serat atau naskah kuno itu masyarakat menemukan teknik pembuatan pestisida alami. Para ilmuwan yang telah memiliki pengetahuan kritis akan mampu memahami kreativitas masyarakat, sehingga seluruh pengembangan teknologi modern bisa digunakan untuk memfasilitasi kemajuan pertanian. ❖